

SKENARIO ALTERNATIF KEBIJAKAN PENINGKATAN ANGGARAN OPERASIONAL KELURAHAN

Akbar Pandu Dwinugraha¹, Adhinda Dewi Agustine^{2*}
ap.dwinugroho@gmail.com¹, adhinda.dewi@unmer.ac.id²
^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Merdeka Malang

Abstract

It cannot be denied that the implementation of public services in the kelurahan should be supported by optimal operational funding according to the needs of the kelurahan. Unfortunately, the operational budgets that exist in each kelurahan are not currently based on a standard cost analysis that is able to accommodate the need to provide the community with a minimum service standard. This research uses descriptive qualitative research. Conducted in the City of Probolinggo, while the selection of research locations is determined based on the cluster of sub-districts in the City of Probolinggo by determining one sub-district to one village. The result of the research states that the method used in determining the amount of financing to each sub-district is top-down. The alternative policy scenario offered is to use a top down and bottom up combination model in calculating the distribution of operational funds to each sub-district. The percentage of calculating operational financing on average can be increased to 70%, while the proportion of proportional cost calculation for kelurahan can be reduced to 30% provided that adding the existing factors in the bottom up model is used as a calculation factor adding to the six pre-existing factors

Keywords: *Scenarios, Policies, Budgets, Kelurahan*

Abstrak

Tidak bisa dipungkiri bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di kelurahan sudah sepantasnya terdukung oleh pendanaan operasional yang optimal menyesuaikan kebutuhan kelurahan. Sayangnya anggaran operasional yang ada di masing-masing kelurahan saat ini belum didasarkan pada analisis standar biaya yang mampu mengakomodir kebutuhan untuk memberikan standar pelayanan minimal secara prima kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dilakukan di Kota Probolinggo sedangkan pemilihan lokasi penelitian ditentukan berdasarkan klaster kecamatan yang ada di Kota Probolinggo dengan penentuan satu kecamatan satu kelurahan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa metode yang digunakan dalam menentukan jumlah pembiayaan ke masing-masing kelurahan bersifat top-down. Skenario alternatif kebijakan yang ditawarkan adalah menggunakan model kombinasi top down dan bottom up dalam menghitung pembagian dana operasional kepada masing-masing kelurahan. Persentase perhitungan pembiayaan operasional sama rata bisa ditingkatkan menjadi 70% sedangkan persentase perhitungan biaya proporsional kelurahan bisa diturunkan menjadi 30% dengan catatan menambahkan faktor yang ada di model bottom up untuk dijadikan faktor

perhitungan menambah enam faktor yang telah ada sebelumnya
Keywords: *Skenario, Kebijakan, Anggaran, Sub-District*

Pendahuluan

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia secara efektif dilaksanakan sejak tahun 2000 dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran serta masyarakat dan daya saing daerah. Sejalan dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Seiring dengan terjadinya perkembangan dan dinamika di bidang pemerintahan khususnya pemerintahan daerah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Secara yuridis keberadaan perangkat daerah terjadi perubahan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Bab I Pendahuluan I - 3 Nomor 32 Tahun 2004. Perangkat Daerah berdasarkan pasal 120 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 terdiri dari; (1) Sekretariat Daerah (2) Dinas Daerah (3) Lembaga Teknis Daerah (4) Sekretariat Daerah (5) Kecamatan (6) Kelurahan. Terlihat bahwa institusi kecamatan dan kelurahan menjadi bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, sehingga secara langsung Camat dan Lurah bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Namun pada UU Nomor 23 Tahun 2014, terjadi perubahan posisi Kelurahan yang selama ini berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 menempatkan kelurahan sebagai perangkat daerah namun pada saat ini merujuk kepada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 menjadi perangkat kecamatan, sehingga konsekuensinya Lurah tidak lagi bertanggungjawab secara langsung kepada Bupati/Walikota akan tetapi bertanggungjawab langsung kepada Camat.

Meskipun kelurahan tidak lagi bertanggung jawab langsung kepada bupati melainkan kepada camat, tidak bisa dipungkiri bahwa penyelenggaraan

pelayanan publik di kelurahan sudah sepantasnya terdukung oleh pendanaan operasional yang optimal menyesuaikan kebutuhan kelurahan. Sayangnya pelayanan kelurahan di wilayah administrasi Kota Probolinggo belum dikatakan optimal. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan anggaran untuk oprasional rutin kelurahan yang tidak mampu mendukung pelayanan terhadap masyarakat. Anggaran operasional yang ada di masing-masing kelurahan saat ini belum didasarkan pada analisis standar biaya yang mampu mengakomodir kebutuhan untuk memberikan standar pelayanan minimal secara prima kepada masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan suatu skenario alternatif kebijakan dalam rangka meningkatkan anggaran operasional kelurahan di Kota Probolinggo.

Istilah skenario pada mulanya selalu dikaitkan pada bidang teater. Tetapi saat ini istilah skenario telah berkembang luas di beberapa bidang, bukan hanya di sektor seni dan bisnis namun juga berkembang disektor publik terutama dalam hal perumusan kebijakan publik. Chermack (2003) menerangkan ruang lingkup skenario meliputi *scenario*, *scenario building*, *scenario planning*. Secara garis besar skenario merupakan alat untuk mengarahkan persepsi seseorang mengenai lingkungan masa depan yang mungkin akan terjadi. *Scenario building* merupakan proses pengkonstruksian pilihan masa depan. Sedangkan *scenario planning* merupakan proses pembelajaran yang menantang organisasi untuk dapat memberikan perhatian terhadap situasi di masa depan yang mungkin berbeda dengan situasi pada saat ini. Dalam konteks kebijakan publik, suatu kebijakan dilakukan skenario menyesuaikan dengan nilai yang berperan membimbing perilaku perumus kebijakan (Anderson,1979). Salah satu nilai yang berperan tersebut adalah *Organization Value*. Nilai ini banyak dipengaruhi oleh nilai organisasinya dalam merumuskan kebijakan publik (Fiscer.2003). dalam konteks penelitian ini, skenario yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan pembiayaan adalah berbasis kepada kebutuhan organisasi tersebut yaitu kelurahan. Skenario kebijakan juga disebut kebijakan prescriptive yang lebih banyak menilai hasil dan dampak kebijakan serta upaya perumus kebijakan dalam meningkatkan mutu dan kualitas kebijakan publik (Williams. 2009). Perumusan kebijakan dalam model ini lebih cenderung memperhatikan urutan

suatu proses yang dilalui dengan pertimbangan rasional (Parson,1997)

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Jenis ini mencoba untuk menggali data secara mendalam melalui pertimbangan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi (Creswell: 2009). Lokasi penelitian dilakukan di Kota Probolinggo. Pemilihan lokasi penelitian pada kelurahan sebagai lokasinya ditentukan berdasarkan klaster kecamatan yang ada di Kota Probolinggo dengan penentuan satu kecamatan satu kelurahan. Teknik pengumpulan data melalui angket kemudian wawancara, literatur review dengan instrumen wawancara terbuka, dokumentasi, dan *Focus Group Discussion* sebagai upaya merepresentasikan data kualitatif sebagaimana menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2005) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain Teknik analisis data yang digunakan yaitu model *sequential explanatory*. Model ini menempatkan data kuantitatif sebagai pusat perhatian (Sugiyono,2013), dimana dokumen utama yang digunakan sebagai pertimbangan analisis data kualitatif adalah terkait penentuan angka dalam anggaran operasional kelurahan sedangkan penggalian data kualitatif menjelaskan jauh lebih dalam tentang data kuantitatif tersebut.

Hasil

Struktur biaya yang diperlukan dalam mendukung kegiatan operasional pelayanan publik merupakan struktur kebutuhan biaya untuk menutup kebutuhan pelayanan rutin dari kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan yang dianggarkan untuk mendukung kegiatan operasional pelayanan publik kelurahan adalah menggunakan dana operasional atau biaya operasional kelurahan yang bersumber dari APBD Kota Probolinggo. Berdasarkan data perhitungan yang telah dilakukan oleh Bappedalitbang sebelumnya bahwa operasional kelurahan dihitung berdasarkan perhitungan sama rata dengan proporsi 60% dan perhitungan proporsional yang mempertimbangkan faktor/variabel tertentu dengan proporsi 40% dari total alokasi operasional Kota Probolinggo. Berdasarkan perhitungan tersebut dihasilkanlah Jumlah Biaya operasional kelurahan pertahun yang mana berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan posting pengeluarannya

digunakan untuk membiayai kegiatan yang dapat diuraikan melalui tabel berikut ini:

Tabel 1. Pos Uraian Pengeluaran Kelurahan Menggunakan dana operasional Kelurahan di Kota Probolinggo

No	Uraian Posting Pengeluaran
1.	Belanja Alat tulis Kantor
2.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
3.	Belanja Bahan bakar minyak dan gas
4.	Belanja peralatan dan perlengkapan kantor rumah tangga habis pakai
5.	Belanja listrik
6.	Belanja surat kabar / majalah
7.	Belanja pembuatan spanduk/banner
8.	Belanja Jasa service
9.	Belanja penggantian suku cadang
10.	Belanja oli/ pelumnas
11.	Belanja fotocopy
12.	Belanja sewa tenda/panggung
13.	Belanja sewa sound system
14.	Belanja makanan minuman rapat
15.	Belanja makanan dan minuman tamu
16.	Belanja makanan dan minuman kegiatan

Berdasarkan tabel 1 diatas, dana operasional kelurahan digunakan untuk membiayai lebih kurang 16 uraian. Kebanyakan dari posting anggaran yang dikeluarkan tersebut merupakan kegiatan-kegiatan kelurahan yang rutin untuk dilakukan di setiap bulannya. Penentuan dari pembagian pembiayaan operasional kelurahan dalam rangka melaksanakan 16 uraian tersebut disajikan melalui tabel 2 berikut.

Tabel 2. Model Top Down Pembiayaan Operasional Kelurahan

No.	Kelurahan	Kemiskinan		Pendidikan		Kesehatan		Jumlah Penduduk		Luas Wilayah		Rukun Tetangga		Bobot	BIAYA OPERASIONAL		
		a1=	0,25	a2	0,2	a3	0,2	a4	0,1	a5	0,1	a6	0,15		Kelurahan n	BOP RATA (60%)	BOPKP (40%)
		RTM	KV1	AUSK M	KV2	GB	KV3	Jiwa	KV4	Km2	KV6	RT	KV7				
1	Wonoasih	272	0,09	16	0,03	1	0,01	3765	0,04	0,843	0,04	27	0,06	0,04902	80.560.850	31.591.530	
2	Jrebeng Kidul	305	0,10	17	0,03	3	0,04	5077	0,06	1,97	0,09	31	0,07	0,06545	80.560.850	42.179.467	
3	Pakistaji	373	0,12	170	0,34	20	0,29	5011	0,06	1,855	0,09	36	0,08	0,18428	80.560.850	118.768.829	
4	Kedunggaleng	169	0,06	24	0,05	0	0,00	2611	0,03	1,298	0,06	17	0,04	0,03819	80.560.850	24.610.976	
5	Kedungasem	305	0,10	67	0,13	4	0,05	7062	0,08	3,145	0,15	35	0,08	0,09692	80.560.850	62.460.805	
6	Sumbertaman	249	0,08	36	0,07	5	0,08	10121	0,11	1,87	0,09	43	0,10	0,08562	80.560.850	55.178.136	
7	Curahgrinting	92	0,03	44	0,09	1	0,01	4609	0,05	1,269	0,06	18	0,04	0,04495	80.560.850	28.966.625	

No.	Kelurahan	Kemiskinan		Pendidikan		Kesehatan		Jumlah Penduduk		Luas Wilayah		Rukun Tetangga		Bobot	BIAYA OPERASIONAL		
		a1=	0,25	a2	0,2	a3	0,2	a4	0,1	a5	0,1	a6	0,15		Kelurahan n	BOP RATA (60%)	BOPKP (40%)
		RTM	KV1	AUSK M	KV2	GB	KV3	Jiwa	KV4	Km2	KV6	RT	KV7				
8	Kanigaran	450	0,15	64	0,13	6	0,09	19137	0,21	3,427	0,16	93	0,21	0,14987	80.560.850	96.586.097	
9	Kebonsari Wetan	131	0,04	0	0,00	3	0,04	5372	0,06	0,976	0,05	22	0,05	0,03672	80.560.850	23.668.508	
10	Sukoharjo	191	0,06	22	0,04	14	0,20	6918	0,08	0,944	0,04	33	0,07	0,08772	80.560.850	56.535.046	
11	Kebonsari Kulon	341	0,11	30	0,06	11	0,16	14884	0,16	1,558	0,07	66	0,15	0,11821	80.560.850	76.181.773	
12	Tisnonegaran	119	0,04	6	0,01	1	0,01	6413	0,07	2,479	0,11	28	0,06	0,04307	80.560.850	27.759.008	

Berdasarkan tabel 2 tersebut skenario model top down merupakan kondisi perhitungan yang dilakukan pemerintah kota Probolinggo dalam membagi dana operasional kepada masing-masing kelurahan. Dimana berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwa (1) Total anggaran operasional 12 Kelurahan adalah Rp. 1.611.217.00,00 dan jumlah ini dibagi 60% untuk operasional sama rata dan 40% untuk BOP Proporsional menyesuaikan kriteria seperti kemiskinan, kesehatan dst. (2) Jumlah total BOP Rata untuk 12 Kelurahan adalah Rp.966.730.200,00 yang mana jumlah ini merupakan hasil dari 60% Total Anggaran 12 Kelurahan. Kemudian Jumlah tersebut dibagi 12 kelurahan yang menghasilkan jumlah Rata Rp. 80.560.850,00 yang mana jumlah ini adalah jumlah BOP yang diterima masing-masing kelurahan sama rata di tahun tersebut.(3)Jumlah total BOP Proporsional adalah Rp.644.486.800,00. Jumlah ini nantinya akan dibagi secara proporsional kepada 12 kelurahan dengan memperhitungkan faktor Kemiskinan, Pendidikan, kesehatan, Jumlah Penduduk, Luas wilayah dan jumlah RT di masing-masing Kelurahan.

Pembahasan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan peningkatan anggaran diantaranya meliputi (1) Faktor Kemiskinan, merupakan faktor yang diperhitungkan secara proporsional dalam penentuan alokasi biaya operasional Kelurahan di Kota Probolinggo. Faktor kemiskinan yang menjadi perhitungan proporsional lebih merujuk kepada jumlah dari rumah tangga miskin di setiap kelurahan di Kota Probolinggo. Dalam perhitungannya kemiskinan memberikan

kontribusi 25% dari total skema perhitungan Proporsional.

2) Faktor Pendidikan, merupakan faktor yang diperhitungkan secara proporsional dalam penentuan alokasi biaya operasional Kelurahan di Kota Probolinggo. Faktor pendidikan yang menjadi perhitungan proporsional lebih merujuk kepada jumlah anak usia sekolah keluarga miskin di setiap kelurahan di Kota Probolinggo. Dalam perhitungannya kemiskinan memberikan kontribusi peningkatan anggaran operasional sebesar 20% dari biaya operasional dalam perhitungan skema proporsional. 3) Faktor Kesehatan, merupakan faktor yang diperhitungkan secara proporsional dalam penentuan alokasi biaya operasional Kelurahan di Kota Probolinggo. Faktor Kesehatan yang menjadi perhitungan proporsional lebih merujuk kepada jumlah dari pengidap gizi buruk di setiap kelurahan di Kota Probolinggo. Dalam perhitungannya Kesehatan memberikan kontribusi peningkatan anggaran operasional sebesar 20% dari biaya operasional perhitungan skema proporsional. 4) Faktor Jumlah Penduduk, merupakan faktor yang diperhitungkan secara proporsional dalam penentuan alokasi biaya operasional Kelurahan di Kota Probolinggo. Faktor Jumlah penduduk yang menjadi perhitungan proporsional lebih merujuk kepada jumlah penduduk (jiwa) di setiap kelurahan di Kota Probolinggo. Dalam perhitungannya Jumlah penduduk memberikan kontribusi peningkatan anggaran operasional sebesar 10% dari operasional Proporsional. 5) Faktor Luas Wilayah merupakan faktor yang diperhitungkan secara proporsional dalam penentuan alokasi biaya operasional Kelurahan di Kota Probolinggo. Luas Wilayah yang menjadi perhitungan proporsional lebih merujuk kepada jumlah luas wilayah di setiap kelurahan di Kota Probolinggo. Dalam perhitungannya luas wilayah memberikan kontribusi peningkatan anggaran operasional sebesar 10% dari biaya operasional berdasarkan perhitungan skema proporsional. 6) Faktor Jumlah RT merupakan faktor yang diperhitungkan secara proporsional dalam penentuan alokasi biaya operasional Kelurahan di Kota Probolinggo. Faktor Jumlah RT yang menjadi perhitungan proporsional lebih merujuk kepada jumlah dari rukun tetangga di setiap kelurahan di Kota Probolinggo. Dalam perhitungannya Jumlah RT memberikan kontribusi peningkatan anggaran OPERASIONAL sebesar 15% dari operasional Proporsional.

Skenario Alternatif Kebijakan Peningkatan Anggaran Operasional Kelurahan Model *Bottom-up*

Skenario bottom up merupakan skenario kebijakan perhitungan BOP dengan mempertimbangkan permasalahan dari bawah yang selama ini sering dihadapi oleh kelurahan-kelurahan di Kota Probolinggo. Permasalahan tersebut ditelaah untuk diproyeksikan menjadi variabel variabel yang secara proporsional mempengaruhi pendapatan atau jumlah BOP masing-masing kelurahan. Beberapa dari variabel tersebut meliputi (1) Luasan kantor yang harus dirawat. Luasan kantor yang berbeda antara kelurahan satu dengan yang lainnya bisa diajukan menjadi variabel yang secara proporsional membedakan perolehan anggaran operasional di masing-masing kelurahan. Variabel ini nantinya diperhitungkan dari sisi luas kantor per m². (2) Biaya Aksidental (kegiatan sosial,keagamaan dan perlombaan) Biaya aksidental merupakan biaya yang dikeluarkan oleh kelurahan untuk kegiatan sosial, keagamaan dan perlombaan. Biaya ini tidak semuanya terdukung oleh biaya operasional dan disarankan untuk dapat terdukung oleh dana operasional kelurahan. (3) Forum rapat (koordinasi dengan struktur kelurahan kebawah Forum rapat merupakan bentuk koordinasi dari kelurahan dengan struktur yang ada dibawahnya dalam rangka menjalin sinergitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kelurahan. Kegiatan ini belum terdukung sepenuhnya oleh biaya operasional mengingat perlunya koordinasi sesering mungkin untuk menjamin kesinergian antara kelurahan dengan struktur yang ada di bawahnya. (4) Prestasi Khusus. Prestasi khusus kelurahan merupakan prestasi yang pernah diraih oleh kelurahan. Prestasi ini sebenarnya menjadi dasar dari OPD untuk menentukan peserta perlombaan yang seringkali menjadi permasalahan yang dihadapi oleh kelurahan karena datangnya tiba-tiba. Dengan mencantumkan prestasi khusus menjadi variable yang secara proporsional diperhatikan dalam perhitungan biaya operasional, hal ini akan sedikit banyak menanggulangi permasalahan pembiayaan perlombaan dikelurahan berdasarkan instruksi OPD yang dulunya tidak diperbolehkan untuk menggunakan dana operasional kelurahan.

Model Kombinasi

Skenario kombinasi merupakan skenario yang menggabungkan skenario top down dan bottom up. Dari skenario ini bisa dilakukan beberapa hal diantaranya (1) Penggunaan perhitungan BOP sesuai dengan cara sebelumnya atau proporsi 60:40 tetapi menambahkan variable yang ada di skenario bottom up untuk dijadikan faktor perhitungan menambah enam faktor yang ada sebelumnya. (2) Peningkatan dan penurunan persentase perhitungan BOP dari alokasi total anggaran BOP kepada Kelurahan tersebut sebagaimana yang telah disimulasikan diatas. Presentase awal 60% untuk BOP rata bisa ditingkatkan menjadi 70% sedangkan perhitungan BOP proporsional kelurahan bisa menurun dari 40% menjadi 30%. (3) Peningkatan dan penurunan persentase perhitungan BOP dari alokasi total anggaran BOP kepada Kelurahan tersebut sebagaimana yang telah disimulasikan diatas. Presentase awal 60% untuk BOP rata bisa ditingkatkan menjadi 70% sedangkan perhitungan BOP proporsional kelurahan bisa menurun dari 40% menjadi 30%. Kemudian menambahkan variable yang ada di skenario bottom up untuk dijadikan faktor perhitungan menambah enam faktor yang ada sebelumnya.

Simpulan

Faktor faktor yang mempengaruhi peningkatan anggaran meliputi faktor jumlah rumah tangga miskin disetiap kelurahan, faktor jumlah anak usia sekolah keluarga miskin di setiap kelurahan, faktor jumlah pengidap gizi buruk disetiap kelurahan, faktor jumlah penduduk, faktor luas wilayah serta faktor jumlah RT di setiap kelurahan. Semakin besar jumlah dari masing-masing faktor tersebut, maka dana operasional kelurahan juga akan semakin meningkat. Skenario alternatif kebijakan dalam peningkatan operasional terdiri dari skenario *Bottom up* dan Kombinasi. Skenario alternatif kebijakan kombinasi bisa dilakukan dengan (1) Penggunaan perhitungan biaya operasional sesuai dengan cara sebelumnya atau proporsi 60:40 tetapi menambahkan variable yang ada di skenario bottom up untuk dijadikan faktor perhitungan menambah enam faktor (2) Presentase awal 60% untuk biaya operasional sama rata setiap kelurahan bisa ditingkatkan menjadi 70% sedangkan perhitungan biaya operasional proporsional kelurahan bisa diturunkan dari 40% menjadi 30% kemudian juga menambahkan variable yang ada di model bottom up untuk

dijadikan faktor perhitungan menambah enam faktor yang ada sebelumnya.

Referensi

- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and
winston
- Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, 2018. *Kota Probolinggo dalam Angka*
- Chermack, Thomas James. (2003). *Thesis : A Theory of Scenario Planning*. US :
Umi Microform
- Creswell, John W. (2009). *Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif,
Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Penterjemah
Achmad Fawaid.
- Fiscer, Frank. 2003. *Reframing Public Policy: Discursive Politics and
Deliberative Practices*. Oxford: Oxford University Press
- Lexy J. Moleong. 2005. *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja.
Rosdakarya
- Parsons, Wayne.1997. *Public Policy*. Cheltenham: Edward Elgar
- Sugiyono, (2013). *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung:
Alfa Beta.
- Undang- Undang No. 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- William, John Folk. 2009. *Delierating to Change Public Policy*. Available at
<http://www.crosscollaborate.com/deliberative-democracy-change> Public
Policy